

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

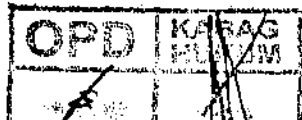
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

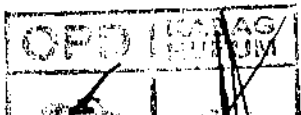
Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);



33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2017 Nomor tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut

1	Pendapatan		
	a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 45.153.983.659	
	b. Dana perimbangan	Rp 860.612.627.000	
	c. Lain-lain pendapatan daerah		
	c. yang sah.....	Rp 230.228.236.002	
	Jumlah Pendapatan		<u>Rp 1.135.994.846.661</u>
2	Belanja		
	a. Belanja Tidak Langsung		
	1) Belanja pegawai	Rp 363.375.940.808	
	2) Belanja bunga	Rp -	
	3) Belanja subsidi	Rp 899.887.500	
	4) Belanja hibah	Rp 11.355.915.000	
	5) Belanja bantuan sosial	Rp 150.000.000	
	6) Belanja bagi hasil	Rp 1.116.520.370	
	7) Belanja bantuan keuangan	Rp 168.507.457.683	
	8) Belanja tidak terduga	Rp 890.853.477	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung		<u>Rp 546.296.574.838</u>
	b. Belanja Langsung		
	1) Belanja pegawai	Rp 63.815.662.149	
	2) Belanja barang dan jasa	Rp 244.951.382.286	
	3) Belanja Modal	Rp 289.684.109.388	
	Jumlah Belanja Langsung		<u>Rp 598.451.153.823</u>
	Jumlah Belanja		<u>Rp 1.144.747.728.661</u>
	Surplus (defisit)		<u>Rp (8.752.882.000)</u>
3	Pembiayaan		
	a. Penerimaan	Rp 10.252.882.000	
	b. Pengeluaran	Rp 1.500.000.000	
	Jumlah Pembiayaan Netto.....		<u>Rp 8.752.882.000</u>
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaar		-

Pasal 2

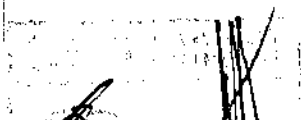
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 6

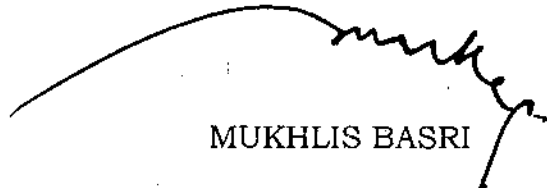
Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung

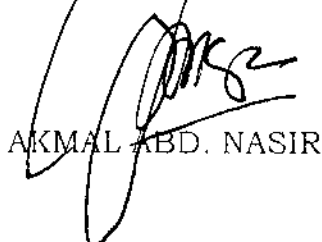
Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Desember 2017
BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI






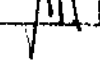

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 8 Desember 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 66

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BPKD	
5	Bappeda	
6	bid. pembangunan	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 39 Tahun 2017
 TANGGAL : 8 Desember 2017
 TENTANG
 PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

Hal 1 dari 27

Kode rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.135.994.846.661,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	45.153.983.659,00
1.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH	9.949.919.629,00
1.1.1.01.	PAJAK HOTEL	77.188.350,00
1.1.1.01.04.	HOTEL BINTANG TIGA	4.465.000,00
1.1.1.01.08.	HOTEL MELATI DUA	66.663.350,00
1.1.1.01.12.	LOSMEN/RUMAH PENGINAPAN/PESANGGRAHA/HOSTEL/RUMAH KOS	6.060.000,00
1.1.1.02.	PAJAK RESTORAN	1.253.340.000,00
1.1.1.02.01.	RESTORAN	1.210.560.000,00
1.1.1.02.02.	RUMAH MAKAN	19.260.000,00
1.1.1.02.06.	WARUNG	23.520.000,00
1.1.1.03.	PAJAK HIBURAN	2.500.000,00
1.1.1.03.20.	PERTUNJUKAN/SHOW	2.500.000,00
1.1.1.04.	PAJAK REKLAME	54.862.828,00
1.1.1.04.01.	REKLAME PAPAN/BILLBOARD/VIDEOTRON/MEGATRON	53.242.828,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.1.1.04.02.	REKLAME KAIN	1.620.000,00
1.1.1.05.	PAJAK PENERANGAN JALAN	5.040.000.000,00
1.1.1.05.04.	PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LA'IN	5.040.000.000,00
1.1.1.12.	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	3.514.528.451,00
1.1.1.12.01.	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.	3.514.528.451,00
1.1.1.13.	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	7.500.000,00
1.1.1.13.02.	BPHTB - PEMINDAHAN HAK	7.500.000,00
1.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	2.129.705.700,00
1.1.2.01.	RETRIBUSI JASA UMUM	1.194.006.200,00
1.1.2.01.05.	RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	181.916.000,00
1.1.2.01.15.	PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	271.915.800,00
1.1.2.01.21.	PENGAMBILAN/PENGUMPULAN SAMPAH DARI SUMBERNYA KE LOKASI PEMBUANGAN SEMENTARA	30.996.000,00
1.1.2.01.22.	PENGANGKUTAN SAMPAH DARI SUMBERNYA DAN/ATAU LOKASI PEMBUANGAN SEMENTARA KE LOKASI PEMBUANGAN/PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH	76.900.000,00
1.1.2.01.32.	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PELATARAN	7.104.000,00
1.1.2.01.33.	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR LOS	120.962.400,00
1.1.2.01.34.	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KIOS	177.811.200,00
1.1.2.01.37.	RETRIBUSI PKB MOBIL PENUMPANG MINIBUS	1.050.000,00
1.1.2.01.39.	RETRIBUSI PKB MOBIL BUS	440.000,00
1.1.2.01.40.	RETRIBUSI PKB MOBIL BARANG/BEBAN PICK UP	56.430.000,00
1.1.2.01.42.	RETRIBUSI PKB MOBIL BARANG/BEBAN TRUCK	34.430.000,00
1.1.2.01.61.	PEMANFAATAN RUANG UNTUK MENARA TELEKOMUNIKASI	226.100.800,00
1.1.2.01.62.	RETRIBUSI BUKU PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	7.950.000,00
1.1.2.02.	RETRIBUSI JASA USAHA	857.999.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.1.2.02.01.	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	123.620.000,00
1.1.2.02.02.	RETRIBUSI PASAR GROSIR / PERTOKOAN	241.200.000,00
1.1.2.02.05.	RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR	74.256.000,00
1.1.2.02.06.	RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA	145.398.500,00
1.1.2.02.08.	RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	4.935.000,00
1.1.2.02.10.	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	3.840.000,00
1.1.2.02.13.	RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH	79.850.000,00
1.1.2.02.14.	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - PENYEWAAN TANAH DAN BANGUNAN	163.100.000,00
1.1.2.02.16.	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - RUANGAN	15.500.000,00
1.1.2.02.27.	RETRIBUSI TERMINAL TEMPAT KEGIATAN USAHA	6.300.000,00
1.1.2.03.	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	77.700.000,00
1.1.2.03.01.	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	75.000.000,00
1.1.2.03.04.	RETRIBUSI IZIN TRAYEK	2.700.000,00
1.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	3.400.933.330,00
1.1.3.01.	BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	3.400.933.330,00
1.1.3.01.02.	BAGIAN LABA PT. BANK LAMPUNG	3.400.933.330,00
1.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	29.673.425.000,00
1.1.4.02.	JASA GIRO	1.000.000.000,00
1.1.4.02.01.	JASA GIRO KAS DAERAH	1.000.000.000,00
1.1.4.03.	PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO	2.000.000.000,00
1.1.4.03.01.	REKENING DEPOSITO PADA BANK	2.000.000.000,00
1.1.4.10.	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	200.000.000,00
1.1.4.10.04.	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS	400.000,00
1.1.4.10.11.	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN PEKERJAAN	199.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.1.4.22	DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	9.549.540.000,00
1.1.4.22.01	DANA KAPITASI JKN FKTP SUMBER JAYA	716.100.000,00
1.1.4.22.02	DANA KAPITASI JKN FKTP KEBUN TEBU	617.925.000,00
1.1.4.22.03	DANA KAPITASI JKN FKTP BUNGIN	428.505.000,00
1.1.4.22.04	DANA KAPITASI JKN FKTP FAJAR BULAN	751.905.000,00
1.1.4.22.05	DANA KAPITASI JKN FKTP SEKINCAU	519.750.000,00
1.1.4.22.06	DANA KAPITASI JKN FKTP PAGAR DEWA	361.515.000,00
1.1.4.22.07	DANA KAPITASI JKN FKTP BANDAR NEGERI SUOH	993.300.000,00
1.1.4.22.08	DANA KAPITASI JKN FKTP SRIMULYO	410.025.000,00
1.1.4.22.09	DANA KAPITASI JKN FKTP KENALI	716.100.000,00
1.1.4.22.10	DANA KAPITASI JKN FKTP BATU BRAK	450.450.000,00
1.1.4.22.11	DANA KAPITASI JKN FKTP LIWA	1.247.400.000,00
1.1.4.22.12	DANA KAPITASI JKN FKTP BUAY NYERUPA	1.149.225.000,00
1.1.4.22.13	DANA KAPITASI JKN FKTP LOMBOK	277.200.000,00
1.1.4.22.14	DANA KAPITASI JKN FKTP AIR HITAM	425.040.000,00
1.1.4.22.15	DANA KAPITASI JKN FKTP BATU KETULIS	485.100.000,00
1.1.4.23	DANA NON KAPITASI JKN PADA FKTP	1.980.000.000,00
1.1.4.23.01	DANA NON KAPITASI JKN FKTP SUMBER JAYA	165.000.000,00
1.1.4.23.02	DANA NON KAPITASI JKN FKTP KEBON TEBU	165.000.000,00
1.1.4.23.03	DANA NON KAPITASI JKN FKTP BUNGIN	110.000.000,00
1.1.4.23.04	DANA NON KAPITASI JKN FKTP FAJAR BULAN	165.000.000,00
1.1.4.23.05	DANA NON KAPITASI JKN FKTP SEKINCAU	110.000.000,00
1.1.4.23.06	DANA NON KAPITASI JKN FKTP PAGAR DEWA	110.000.000,00
1.1.4.23.07	DANA NON KAPITASI JKN FKTP BANDAR NEGRI SUOH	110.000.000,00
1.1.4.23.08	DANA NON KAPITASI JKN FKTP SRIMULYO	165.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.1.4.23.09.	DANA NON KAPITASI JKN FKTP KENALI	110.000.000,00
1.1.4.23.10.	DANA NON KAPITASI JKN FKTP BATU BRAK	110.000.000,00
1.1.4.23.11.	DANA NON KAPITASI JKN FKTP LIWA	165.000.000,00
1.1.4.23.12.	DANA NON KAPITASI JKN FKTP BUAY NYERUPA	110.000.000,00
1.1.4.23.13.	DANA NON KAPITASI JKN FKTP LOMBOK	110.000.000,00
1.1.4.23.14.	DANA NON KAPITASI JKN FKTP AIR HITAM	110.000.000,00
1.1.4.23.15.	DANA NON KAPITASI JKN FKTP BATU KETULIS	165.000.000,00
1.1.4.27.	PENDAPATAN BLUD	14.943.885.000,00
1.1.4.27.01	PENDAPATAN JASA LAYANAN UMUM BLUD	14.938.885.000,00
1.1.4.27.04.	PENDAPATAN BLUD NON OPERASIONAL	5.000.000,00
1.2.	DANA PERIMBANGAN	860.612.627.000,00
1.2.1.	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	26.240.072.000,00
1.2.1.01	BAGI HASIL PAJAK	15.159.738.000,00
1.2.1.01.03	BAGI HASIL DARI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PPH PASAL 21	6.574.167.000,00
1.2.1.01.04.	PENGEMBALIAN PBB BAGIAN PEMERINTAH PUSAT	5.232.778.000,00
1.2.1.01.11.	BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU	3.352.793.000,00
1.2.1.02.	BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM	11.080.334.000,00
1.2.1.02.02	BAGI HASIL DARI PROVISI SUMBER DAYA HUTAN	133.081.000,00
1.2.1.02.06.	BAGI HASIL SDA PERIKANAN	943.027.000,00
1.2.1.02.08.	BAGI HASIL DARI PERTAMBANGAN MINYAK BUMI	9.080.602.000,00
1.2.1.02.12	BAGI HASIL DARI SDA PENGUSAHAAN PANAS BUMI	685.995.000,00
1.2.1.02.13	BAGI HASIL DARI PERTAMBANGAN UMUM	237.629.000,00
1.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	521.743.958.000,00
1.2.2.01.	DANA ALOKASI UMUM	521.743.958.000,00
1.2.2.01.01.	DANA ALOKASI UMUM	521.743.958.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	312.628.597.000,00
1.2.3.02.	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	227.387.050.000,00
1.2.3.02.01.	DAK REGULER	42.572.677.000,00
1.2.3.02.02.	DAK PENUGASAN	100.637.000.000,00
1.2.3.02.03.	DAK AFIRMASI	84.177.373.000,00
1.2.3.03.	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	85.241.547.000,00
1.2.3.03.01.	DAK TUNJANGAN PROFESI GURU	61.873.607.000,00
1.2.3.03.02.	DAK TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNS / NON PROFESI	1.554.000.000,00
1.2.3.03.03.	DAK BANTUAN OPERASIONAL. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP PAUD)	2.971.200.000,00
1.2.3.03.04.	DAK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	13.434.162.000,00
1.2.3.03.05.	DAK BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	4.294.310.000,00
1.2.3.03.09.	DAK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.114.268.000,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	230.228.236.002,00
1.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	51.756.600.000,00
1.3.1.01.	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH	16.750.000.000,00
1.3.1.01.01.	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH.	16.750.000.000,00
1.3.1.06.	PENDAPATAN HIBAH DANA BOS	35.006.600.000,00
1.3.1.06.01.	HIBAH DANA BOS	35.006.600.000,00
1.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH	66.406.856.002,00
1.3.3.01.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	66.406.856.002,00
1.3.3.01.01.	BAGI HASIL DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	11.999.852.868,00
1.3.3.01.03.	BAGI HASIL DARI BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	14.990.736.447,00
1.3.3.01.05.	BAGI HASIL DARI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	21.676.224.937,00
1.3.3.01.07.	BAGI HASIL DARI PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR FERMUKAAN	266.620.664,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.3.3.01.08.	BAGI HASIL DARI PAJAK ROKOK	17.473.421.086,00
1.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	112.064.780.000,00
1.3.4.03.	DANA ALOKASI DESA/PEKON	112.064.780.000,00
1.3.4.03.02.	DANA ALOKASI DESA/PEKON (ADP)	112.064.780.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.135.994.846.661,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.	BELANJA DAERAH	1.144.747.728.661,00
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	546.296.574.838,00
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	363.375.940.808,00
2.1.1.01.	GAJI DAN TUNJANGAN	335.099.059.208,00
2.1.1.01.01.	GAJI POKOK PNS/ANGKUTAN REPRESENTASI	203.568.081.820,00
2.1.1.01.02.	TUNJANGAN KELUARGA	16.974.459.715,00
2.1.1.01.03.	TUNJANGAN JABATAN	8.391.916.000,00
2.1.1.01.04.	TUNJANGAN FUNGSIONAL	14.117.185.300,00
2.1.1.01.05.	TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM	1.807.139.350,00
2.1.1.01.06.	TUNJANGAN BERAS	10.656.741.624,00
2.1.1.01.07.	TUNJANGAN PPH/TUNJANGAN KHUSUS	788.159.015,00
2.1.1.01.08.	PEMBULATAN GAJI	2.384.376,00
2.1.1.01.09.	IURAN ASURANSI KESEHATAN	7.924.769.808,00
2.1.1.01.10.	UANG PAKET	67.032.000,00
2.1.1.01.11.	TUNJANGAN BADAN MUSYAWARAH	22.106.700,00
2.1.1.01.12.	TUNJANGAN KOMISI	43.299.900,00
2.1.1.01.13.	TUNJANGAN BADAN ANGGARAN	29.780.100,00
2.1.1.01.14.	TUNJANGAN BADAN KEHORMATAN	11.510.100,00
2.1.1.01.15.	TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN LAINNYA	29.780.100,00
2.1.1.01.16.	TUNJANGAN PERUMAHAN	3.072.000.000,00
2.1.1.01.18.	UANG JASA PENGABDIAN	35.000.000,00
2.1.1.01.21.	TUNJANGAN BADAN LEGISLASI	12.606.300,00
2.1.1.01.22.	TUNJANGAN RESES	661.500.000,00
2.1.1.01.23.	TUNJANGAN TRANSPORTASI	3.456.000.000,00
2.1.1.01.24.	TUNJANGAN PROFESI GURU	56.280.162.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.1.1.01.25.	TUNJANGAN GURU PNS/NON PROFESI	1.554.000.000,00
2.1.1.01.26.	TUNJANGAN KHUSUS GURU	5.593.445.000,00
2.1.1.02.	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	25.182.000.000,00
2.1.1.02.01.	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA	24.416.400.000,00
2.1.1.02.02.	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS	748.800.000,00
2.1.1.02.03.	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA	16.800.000,00
2.1.1.03.	BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA KDH/WKDH	3.094.881.600,00
2.1.1.03.01.	TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	2.646.000.000,00
2.1.1.03.02.	BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL KDH/WKDH	338.001.600,00
2.1.1.03.03.	BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD	110.880.000,00
2.1.3.	BELANJA SUBSIDI	899.887.500,00
2.1.3.01.	BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN/LEMBAGA	899.887.500,00
2.1.3.01.03.	BELANJA SUBSIDI KEPADA BUMN	899.887.500,00
2.1.4.	BELANJA HIBAH	11.355.915.000,00
2.1.4.05.	BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI	11.355.915.000,00
2.1.4.05.01.	HIBAH KEPADA LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH	2.912.315.000,00
2.1.4.05.02.	HIBAH KEPADA ORGANISASI OLAH RAGA DAERAH	1.075.000.000,00
2.1.4.05.03.	HIBAH KEPADA ORGANISASI PROFESI	825.000.000,00
2.1.4.05.04.	HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN GENERASI MUDA	300.000.000,00
2.1.4.05.05.	HIBAH KEPADA ORGANISASI KEAGAMAAN	1.445.000.000,00
2.1.4.05.06.	HIBAH KEPADA ORGANISASI SOSIAL WANITA	255.000.000,00
2.1.4.05.07.	HIBAH KEPADA ORGANISASI SENI DAN PARIWISATA	685.000.000,00
2.1.4.05.08.	HIBAH KEPADA LEMBAGA/ORGANISASI PENDIDIKAN	3.453.600.000,00
2.1.4.05.09.	HIBAH KEPADA ORGANISASI VETERAN	30.000.000,00
2.1.4.05.10.	HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI LAINNYA	375.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	150.000.000,00
2.1.5.02.	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT	150.000.000,00
2.1.5.02.01.	BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT	150.000.000,00
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	1.116.520.370,00
2.1.6.03.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA	940.991.970,00
2.1.6.03.01.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN PEKON	940.991.970,00
2.1.6.05.	BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA	175.528.400,00
2.1.6.05.01.	BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN PEKON	175.528.400,00
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	168.507.457.683,00
2.1.7.01.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI	900.000.000,00
2.1.7.01.01.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI	900.000.000,00
2.1.7.03.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	166.936.183.000,00
2.1.7.03.01.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEKON	166.936.183.000,00
2.1.7.05.	BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK	671.274.683,00
2.1.7.05.01.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARPOL	671.274.683,00
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	890.853.477,00
2.1.8.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA	890.853.477,00
2.1.8.01.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA	890.853.477,00
2.2.	BELANJA LANGSUNG	598.451.153.823,00
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	63.815.662.149,00
2.2.1.01.	HONORARIUM PNS	28.593.769.110,00
2.2.1.01.02.	HONORARIUM TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA	39.225.000,00
2.2.1.01.03.	HONORARIUM TIM PENERIMA BARANG DAN JASA	27.175.000,00
2.2.1.01.04.	HONORARIUM TIM JURI DAN PEMBINA	409.450.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.1.01.05.	HONORARIUM PETUGAS LAPANGAN	2.661.090.000,00
2.2.1.01.06.	HONORARIUM BAPERJAKAT	12.000.000,00
2.2.1.01.07.	HONORARIUM BAPEK	31.500.000,00
2.2.1.01.09.	HONORARIUM PESERTA	285.850.000,00
2.2.1.01.10.	HONORARIUM PENGAWAS/PEGAWAI TENAGA TEKNIS	14.209.559.110,00
2.2.1.01.11.	HONORARIUM TIM PENYUSUN DOKUMEN	1.783.720.000,00
2.2.1.01.12.	HONORARIUM TIM KOORDINASI	4.678.275.000,00
2.2.1.01.13.	HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	166.900.000,00
2.2.1.01.14.	HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN	68.725.000,00
2.2.1.01.15.	HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN	59.100.000,00
2.2.1.01.16.	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN	4.108.800.000,00
2.2.1.01.17.	HONORARIUM TIM PENELUSURAN ALAS HAK	52.400.000,00
2.2.1.02.	HONORARIUM NON PNS	18.152.839.500,00
2.2.1.02.02.	HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP	13.854.620.000,00
2.2.1.02.03.	HONORARIUM PESERTA	2.395.050.000,00
2.2.1.02.04.	HONORARIUM TENAGA MEDIS	25.400.000,00
2.2.1.02.05.	HONORARIUM TENAGA SURVEY	237.925.000,00
2.2.1.02.06.	HONORARIUM TEKNISI ICT	13.200.000,00
2.2.1.02.07.	HONORARIUM/UPAH TENAGA TIDAK TERAMPIL	395.394.500,00
2.2.1.02.08.	HONORARIUM/UPAH TUKANG	155.100.000,00
2.2.1.02.09.	HONORARIUM/UPAH TENAGA KEBERSIHAN	636.950.000,00
2.2.1.02.10.	HONORARIUM/UPAH KEPALA LINGKUNGAN	439.200.000,00
2.2.1.03.	UANG LEMBUR	684.662.000,00
2.2.1.03.01.	UANG LEMBUR PNS	659.532.000,00
2.2.1.03.02.	UANG LEMBUR NON PNS	25.130.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.1.04.	HONORARIUM PENGELOLAAN DANA BOS	7.074.217.539,00
2.2.1.04.01.	HONORARIUM PENGELOLAAN DANA BOS.	7.074.217.539,00
2.2.1.07.	BELANJA PEGAWAI BLUD	7.611.400.000,00
2.2.1.07.01.	BELANJA PEGAWAI BLUD.	7.611.400.000,00
2.2.1.09.	BELANJA PEGAWAI BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	1.698.774.000,00
2.2.1.09.01.	BELANJA PEGAWAI BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	1.698.774.000,00
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	244.951.382.286,00
2.2.2.01.	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	7.207.225.740,00
2.2.2.01.01	BELANJA ALAT TULIS KANTOR	4.694.932.090,00
2.2.2.01.02.	BELANJA DOKUMEN/ ADMINISTRASI TENDER	2.400.000,00
2.2.2.01.03.	BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK (LAMPU PIJAR, BATTERY KERING)	834.908.700,00
2.2.2.01.04.	BELANJA PERANGKO, MATERAI DAN BENDA POS	163.237.000,00
2.2.2.01.05.	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH	583.246.050,00
2.2.2.01.06	BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS	452.526.400,00
2.2.2.01.07.	BELANJA PENGISIAN TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	17.900.000,00
2.2.2.01.08.	BELANJA PENGISIAN TABUNG GAS	100.855.000,00
2.2.2.01.09.	BELANJA DOKUMENTASI	286.943.000,00
2.2.2.01.10.	BELANJA BAHAN KEDOTERAN HEWAN	53.505.000,00
2.2.2.01.11	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS PERLENGKAPAN GUDANG	16.772.500,00
2.2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	11.815.503.557,00
2.2.2.02.01.	BELANJA BAHAN BAKU BANGUNAN	1.958.441.400,00
2.2.2.02.02	BELANJA BAHAN/BIBIT TANAMAN	687.855.000,00
2.2.2.02.03.	BELANJA BIBIT TERNAK	445.000.000,00
2.2.2.02.04	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN	3.337.592.425,00
2.2.2.02.05	BELANJA BAHAN KIMIA	982.081.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.2.02.07.	BELANJA TEROPY/PIALA	141.800.000,00
2.2.2.02.08.	BELANJA BAHAN PENGOBATAN	690.482.782,00
2.2.2.02.09.	BELANJA BAHAN PAMERAN	622.170.000,00
2.2.2.02.10.	BELANJA BAHAN ELEKTRONIK / MESIN	403.563.000,00
2.2.2.02.11.	BELANJA BAHAN DISPLAY/DEKORASI	561.423.000,00
2.2.2.02.12.	BELANJA BAHAN PERALATAN KESEHATAN	263.550.000,00
2.2.2.02.13.	BELANJA BAHAN PERAGA	294.515.500,00
2.2.2.02.15.	BELANJA BAHAN MATERIAL PERTANIAN/PERKEBUNAN	489.864.000,00
2.2.2.02.17.	BELANJA BAHAN SARANA BUDIDAYA IKAN	32.700.000,00
2.2.2.02.18.	BELANJA BAHAN/ALAT SAMPLE	162.974.000,00
2.2.2.02.19.	BELANJA BAHAN MAKANAN	102.303.000,00
2.2.2.02.20.	BELANJA BAHAN/MATERIAL ALAT PENGOLAHAN	111.295.000,00
2.2.2.02.21.	BELANJA BAHAN PERLENGKAPAN LOMBA	289.230.700,00
2.2.2.02.22.	BELANJA BAHAN RUMAH TANGGA	29.625.000,00
2.2.2.02.23.	BELANJA BAHAN PELATIHAN/SEMINAR KIT	39.037.750,00
2.2.2.02.24.	BELANJA BAHAN BAKU PEMBUATAN KEMASAN	170.000.000,00
2.2.2.03.	BELANJA JASA KANTOR	24.537.716.102,00
2.2.2.03.01.	BELANJA TELEPON	1.210.021.000,00
2.2.2.03.02.	BELANJA AIR	240.510.400,00
2.2.2.03.03.	BELANJA LISTRIK	5.324.604.000,00
2.2.2.03.05.	BELANJA SURAT KABAR/MAJALAH	3.025.990.000,00
2.2.2.03.06.	BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET	1.595.310.702,00
2.2.2.03.07.	BELANJA PAKET/PENGIRIMAN	136.146.000,00
2.2.2.03.08.	BELANJA SERTIFIKASI	392.100.000,00
2.2.2.03.09.	BELANJA JASA TRANSAKSI KEUANGAN	5.307.234.000,00
2.2.2.03.12.	BELANJA JASA PERBAIKAN PERLENGKAPAN KANTOR	142.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.2.03.13.	BELANJA JASA MEDIA ELEKTRONIK	992.150.000,00
2.2.2.03.15.	BELANJA JASA PUBLIKASI	7.232.840.000,00
2.2.2.03.17.	BELANJA JASA PERAWATAN DAN PENGOBATAN	735.000.000,00
2.2.2.03.19.	BELANJA JASA PENGAMANAN	2.400.000,00
2.2.2.03.22.	BELANJA JASA UJI LABOLATORIUM	131.250.000,00
2.2.2.03.27.	BELANJA LANGGANAN DOMAIN	2.000.000,00
2.2.2.03.30.	BELANJA JASA RETRIBUSI SAMPAH	1.020.000,00
2.2.2.03.31.	BELANJA JASA PEMUSNAHAN OBAT	26.000.000,00
2.2.2.03.32.	BELANJA JASA PENYELIDIKAN/PENYIDIKAN	40.640.000,00
2.2.2.04.	BELANJA PREMI ASURANSI	4.824.240.000,00
2.2.2.04.01.	BELANJA PREMI ASURANSI KESEHATAN	4.776.090.000,00
2.2.2.04.02.	BELANJA PREMI ASURANSI BARANG MILIK DAERAH	10.800.000,00
2.2.2.04.04.	BELANJA PREMI ASURANSI JIWA	37.350.000,00
2.2.2.05.	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	11.327.025.513,00
2.2.2.05.01.	BELANJA JASA SERVICE	908.501.000,00
2.2.2.05.02.	BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG	1.123.774.500,00
2.2.2.05.03.	BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS DAN PELUMAS	6.717.531.800,00
2.2.2.05.04.	BELANJA JASA KIR	15.237.500,00
2.2.2.05.05.	BELANJA SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN	378.757.860,00
2.2.2.05.07.	BELANJA BAN DAN ACCU	1.881.871.800,00
2.2.2.05.08.	BELANJA REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR	247.363.550,00
2.2.2.05.09.	BELANJA BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	53.987.503,00
2.2.2.06.	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	14.267.955.250,00
2.2.2.06.01.	BELANJA CETAK	9.752.878.100,00
2.2.2.06.02.	BELANJA PENGGANDAAN	4.426.569.150,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.2.06.03.	BELANJA PENJILIDAN (+ COVER)	88.508.000,00
2.2.2.07.	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	3.377.270.000,00
2.2.2.07.01.	BELANJA SEWA RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS	31.000.000,00
2.2.2.07.02.	BELANJA SEWA GEDUNG/ KANTOR/TEMPAT	1.207.775.000,00
2.2.2.07.03.	BELANJA SEWA RUANG RAPAT/PERTEMUAN	296.200.000,00
2.2.2.07.05	BELANJA SEWA KEBUN / PERLENGKAPAN TAMAN	20.000.000,00
2.2.2.07.06.	BELANJA SEWA HOTEL/PENGINAPAN	1.822.295.000,00
2.2.2.08.	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS	458.800.000,00
2.2.2.08.01	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS DARAT	441.800.000,00
2.2.2.08.02.	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS AIR	17.000.000,00
2.2.2.10.	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	2.669.478.000,00
2.2.2.10.01	BELANJA SEWA MEJA KURSI	354.248.000,00
2.2.2.10.03	BELANJA SEWA PROYEKTOR	7.000.000,00
2.2.2.10.04	BELANJA SEWA GENERATOR	118.250.000,00
2.2.2.10.05	BELANJA SEWA TENDA	1.141.550.000,00
2.2.2.10.06	BELANJA SEWA PAKAIAN ADAT/TRADISIONAL	13.800.000,00
2.2.2.10.07	BELANJA SEWA ALAT SETUDIO	612.730.000,00
2.2.2.10.09.	BELANJA SEWA ELEKTRONIK	197.300.000,00
2.2.2.10.10	BELANJA SEWA ALAT DEKORASI	172.800.000,00
2.2.2.10.14	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	20.300.000,00
2.2.2.10.15	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	1.500.000,00
2.2.2.10.17	BELANJA SEWA ALAT PERAGA	30.000.000,00
2.2.2.11.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	21.584.940.200,00
2.2.2.11.01	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI	4.220.269.500,00
2.2.2.11.02	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	4.713.739.100,00
2.2.2.11.03	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN TAMU	1.440.322.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1.	2	3
2.2.2.11.04.	BELANJA MAKAN DAN MINUM INSIDENTIL	4.675.573.500,00
2.2.2.11.05.	BELANJA MAKAN DAN MINUM RUMAH TANGGA	1.320.000.000,00
2.2.2.11.08	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PELATIHAN	5.115.648.600,00
2.2.2.11.09.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN SOSIALISASI	99.387.000,00
2.2.2.12.	BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA	488.526.000,00
2.2.2.12.01.	BELANJA PAKAIAN DINAS KDH DAN WKDH	123.776.000,00
2.2.2.12.02.	BELANJA PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)	87.500.000,00
2.2.2.12.04.	BELANJA PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)	28.250.000,00
2.2.2.12.05.	BELANJA PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)	36.000.000,00
2.2.2.12.06.	BELANJA PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)	106.400.000,00
2.2.2.12.07.	BELANJA PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)	70.000.000,00
2.2.2.12.08.	BELANJA ATRIBUT	36.600.000,00
2.2.2.13.	BELANJA PAKAIAN KERJA	1.747.282.000,00
2.2.2.13.01.	BELANJA PAKAIAN KERJA LAPANGAN	1.326.522.000,00
2.2.2.13.02.	BELANJA PAKAIAN KERJA BESERTA KELENGKAPANYA	270.430.000,00
2.2.2.13.03.	BELANJA TAS	150.330.000,00
2.2.2.14.	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	1.358.500.000,00
2.2.2.14.02.	BELANJA PAKAIAN ADAT DAERAH	229.000.000,00
2.2.2.14.03.	BELANJA PAKAIAN BATIK TRADISIONAL	267.975.000,00
2.2.2.14.04.	BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA	399.675.000,00
2.2.2.14.05.	BELANJA PAKAIAN PASKIBRA	315.000.000,00
2.2.2.14.08.	BELANJA PAKAIAN MUSLIM	146.850.000,00
2.2.2.15.	BELANJA PERJALANAN DINAS	47.539.114.080,00
2.2.2.15.01.	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	13.772.827.020,00
2.2.2.15.02.	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH	27.098.287.540,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1:	2	3
2.2.2.15.05.	BELANJA TRANSPORTASI	6.667.999.520,00
2.2.2.16.	BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN PNS	105.800.000,00
2.2.2.16.01.	BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR D3	9.550.000,00
2.2.2.16.02.	BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR S1	15.550.000,00
2.2.2.16.03.	BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR S2	80.700.000,00
2.2.2.17.	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS	3.396.390.000,00
2.2.2.17.01.	BELANJA KURSUS-KURSUS SINGKAT / PELATIHAN	3.396.390.000,00
2.2.2.20.	BELANJA PEMELIHARAAN	4.021.239.950,00
2.2.2.20.03.	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	1.430.676.000,00
2.2.2.20.05.	BELANJA PEMELIHARAAN RUMAH JABATAN	166.000.000,00
2.2.2.20.06.	BELANJA PEMELIHARAAN INSTALASI LISTRIK	64.327.950,00
2.2.2.20.07.	BELANJA PEMELIHARAAN INSTALASI TELEPON	5.500.000,00
2.2.2.20.08.	BELANJA PEMELIHARAAN INSTALASI AIR	8.500.000,00
2.2.2.20.09.	BELANJA PEMELIHARAAN TAMAN	44.750.000,00
2.2.2.20.10.	BELANJA PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR	90.575.000,00
2.2.2.20.12.	BELANJA PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI	1.110.000.000,00
2.2.2.20.13.	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BENGKEL	25.000.000,00
2.2.2.20.17.	BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN SEJARAH	54.750.000,00
2.2.2.20.19.	BELANJA PEMELIHARAAN MEUBELAIR	45.000.000,00
2.2.2.20.20.	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	520.143.000,00
2.2.2.20.21.	BELANJA PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN	25.000.000,00
2.2.2.20.22.	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN RUMAH JABATAN	85.200.000,00
2.2.2.20.24.	BELANJA PEMELIHARAAN JARINGAN/INSTALASI INTERNET / WEBSITE	160.100.000,00
2.2.2.20.26.	BELANJA PEMELIHARAAN FASILITAS UMUM	98.000.000,00
2.2.2.20.27.	PEMELIHARAAN ALAT-ALAT KESEHATAN	45.000.000,00
2.2.2.20.28.	BELANJA PEMELIHARAAN LABEL KEPEMILIKAN TANAH	42.718.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
		8.939.993.000,00
2.2.2.21.	BELANJA JASA KONSULTANSI/PIHAK KETIGA	1.300.000.000,00
2.2.2.21.01	BELANJA JASA KONSULTASI PENELITIAN	5.920.643.000,00
2.2.2.21.02.	BELANJA JASA KONSULTASI PERENCANAAN	127.700.000,00
2.2.2.21.03.	BELANJA JASA KONSULTASI PENGAWASAN	20.000.000,00
2.2.2.21.04.	BELANJA JASA KONSULTANSI SOFTWARE	425.000.000,00
2.2.2.21.05.	BELANJA JASA KONSULTANSI PENDAMPINGAN	610.500.000,00
2.2.2.21.07.	BELANJA JASA EVENT ORGANIZER	536.150.000,00
2.2.2.21.08.	BELANJA JASA CLEANING SERVICE	18.422.916.734,00
2.2.2.22.	BELANJA BARANG DANA BOS.	18.422.916.734,00
2.2.2.22.01.	BELANJA BARANG DANA BOS	36.023.291.000,00
2.2.2.23.	BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA	35.675.891.000,00
2.2.2.23.01.	BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	347.400.000,00
2.2.2.23.02.	BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA	3.296.975.000,00
2.2.2.25.	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA	2.963.225.000,00
2.2.2.25.01.	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT.	333.750.000,00
2.2.2.25.02.	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA.	6.838.685.000,00
2.2.2.26.	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	6.838.685.000,00
2.2.2.26.01.	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD.	1.266.358.000,00
2.2.2.27.	BELANJA BARANG DAN JASA BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	1.266.358.000,00
2.2.2.27.01.	BELANJA BARANG DAN JASA BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	9.436.157.160,00
2.2.2.28.	HONORARIUM TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER	9.339.807.160,00
2.2.2.28.01.	HONORARIUM TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER.	96.350.000,00
2.2.2.28.02.	HONORARIUM MODERATOR	289.684.109.388,00
2.2.3	BELANJA MODAL	4.016.160.000,00
2.2.3.01	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.3.01.66.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH KOSONG	4.016.160.000,00
2.2.3.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT	174.410.000,00
2.2.3.02.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN SHINE SAW	28.910.000,00
2.2.3.02.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN PENGOLAH SAMPAH	6.800.000,00
2.2.3.02.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN POMPA AIR	18.000.000,00
2.2.3.02.33.	BELANJA MODAL PENGADAAN ELECTRIC GENERATING SET	120.700.000,00
2.2.3.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	8.316.684.883,00
2.2.3.03.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR MICRO BUS	670.000.000,00
2.2.3.03.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR TRUCK	601.000.000,00
2.2.3.03.10	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR AMBULANS	5.265.684.883,00
2.2.3.05.11	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR PEMADAM KEBAKARAN	1.500.000.000,00
2.2.3.03.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR SEPEDA MOTOR	280.000.000,00
2.2.3.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT TIDAK BERMOTOR	35.300.000,00
2.2.3.04.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN GEROBAK	35.300.000,00
2.2.3.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT BENGKEL	161.900.000,00
2.2.3.08.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN LAS	4.000.000,00
2.2.3.08.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN DAP/PEMBAGI AIR	17.100.000,00
2.2.3.08.09	BELANJA MODAL PENGADAAN SELANG	1.000.000,00
2.2.3.08.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN STEAM	9.300.000,00
2.2.3.08.12	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT BENGKEL OTOMOTIF	125.000.000,00
2.2.3.08.25.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERKAKAS PENGANGKAT	5.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.3.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT PENGOLAHAN PERTANIAN DAN PETERNAKAN	176.297.000,00
2.2.3.09.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN POTONG RUMPUT	43.400.000,00
2.2.3.09.16.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PROCESING	45.000.000,00
2.2.3.09.17.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PASCA PANEN	35.000.000,00
2.2.3.09.18.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PRODUKSI PERIKANAN	45.297.000,00
2.2.3.09.19.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN	4.200.000,00
2.2.3.09.21.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENYIMPANAN	3.400.000,00
2.2.3.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KANTOR	1.871.344.671,00
2.2.3.10.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN TIK	20.900.000,00
2.2.3.10.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN CETAK	1.265.500.000,00
2.2.3.10.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN PENGHANCUR KERTAS	26.000.000,00
2.2.3.10.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	7.150.000,00
2.2.3.10.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN GENSET	340.219.671,00
2.2.3.10.16.	BELANJA PENGADAAN PERALATAN SAR	70.000.000,00
2.2.3.10.17.	BELANJA MODAL PENGADAAN AC	95.730.000,00
2.2.3.10.18.	BELANJA MODAL PENGADAAN PROYEKTOR DAN PERLENGKAPANNYA	43.920.000,00
2.2.3.10.28.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN PEMINDAI SIDIK JARI	1.925.000,00
2.2.3.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	696.911.000,00
2.2.3.11.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALMARI	130.540.000,00
2.2.3.11.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN FILLING KABINET	17.290.000,00
2.2.3.11.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN PENGAMAN KANTOR	40.350.000,00
2.2.3.11.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN BENDERA/UMBUL UMBUL	17.500.000,00
2.2.3.11.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN GORDEN	283.731.000,00
2.2.3.11.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN KARPET	130.000.000,00
2.2.3.11.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN PAPAN STRUKTUR	30.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.3.11.14.	BELANJA MODAL PENGADAAN PAPAN NAMA MEJA	2.500.000,00
2.2.3.11.16	BELANJA MODAL PENGADAAN PALLET	30.000.000,00
2.2.3.11.20	BELANJA MODAL PENGADAAN TEMPAT SAMPAH	12.000.000,00
2.2.3.11.21	BELANJA MODAL KOTAK PERKAKAS	3.000.000,00
2.2.3.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	3.463.510.000,00
2.2.3.12.01	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER MAINFRAME/SERVER	370.000.000,00
2.2.3.12.02	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER/PC	775.150.000,00
2.2.3.12.03	BELANJA MODAL PENGADAAN LAPTOP/NOTE BOOK	1.361.430.000,00
2.2.3.12.04	BELANJA MODAL PENGADAAN PRINTER	144.400.000,00
2.2.3.12.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN SCANER	20.830.000,00
2.2.3.12.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN MONITOR/DISPLAY/LCD	20.500.000,00
2.2.3.12.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN UPS/STABILIZER	43.000.000,00
2.2.3.12.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN JARINGAN KOMPUTER	487.700.000,00
2.2.3.12.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN SOFTWARE/SISTEM APLIKASI KOMPUTER	227.000.000,00
2.2.3.12.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN INTERNET	13.500.000,00
2.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEBELAIR	3.675.382.130,00
2.2.3.13.01	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA KERJA	259.610.000,00
2.2.3.13.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA RAPAT	57.640.000,00
2.2.3.13.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI KERJA	160.125.000,00
2.2.3.13.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI RAPAT	144.810.000,00
2.2.3.13.07	BELANJA MODAL PENGADAAN TEMPAT TIDUR	101.000.000,00
2.2.3.13.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN SOFA	120.000.000,00
2.2.3.13.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUFFET	6.000.000,00
2.2.3.13.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN RAK	67.000.000,00
2.2.3.13.20.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEUBELAIR SEKOLAH	2.154.500.000,00
2.2.3.13.22.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEUBELAIR KANTOR	548.969.130,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.3.13.29.	BELANJA MODAL PENGADAAN LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	55.728.000,00
2.2.3.14.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN DAPUR	427.200.000,00
2.2.3.14.04	BELANJA MODAL PENGADAAN DISPENSER	25.000.000,00
2.2.3.14.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN KULKAS	9.000.000,00
2.2.3.14.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN PIRING/GELAS/MANGKOK/CANGKIR/SENDOK/GARPU/PISAU	334.700.000,00
2.2.3.14.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN MEMASAK	58.500.000,00
2.2.3.15.	BELANJA MODAL PENGADAAN PENGHIAS RUANGAN RUMAH TANGGA	215.500.000,00
2.2.3.15.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN LAMPU HIAS	30.000.000,00
2.2.3.15.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN PENGHIAS RUANGAN	185.500.000,00
2.2.3.16.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT STUDIO	542.524.500,00
2.2.3.16.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN KAMERA	245.604.500,00
2.2.3.16.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN HANDYCAM	58.250.000,00
2.2.3.16.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN TELEVISI	111.070.000,00
2.2.3.16.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEGAPON	67.100.000,00
2.2.3.16.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN SOUND SYSTEM	50.000.000,00
2.2.3.16.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN LAYAR/SCREEN	2.500.000,00
2.2.3.16.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN WIRELES	8.000.000,00
2.2.3.17.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KOMUNIKASI	756.050.000,00
2.2.3.17.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN TELEPON	1.560.000,00
2.2.3.17.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN FAXIMILI	1.560.000,00
2.2.3.17.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN RADIO HF/FM (HANDY TALKIE)	35.320.000,00
2.2.3.17.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN TELEPON SELULER	20.000.000,00
2.2.3.17.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN KIE KIT PENDIDIKAN DAN KEPENDUDUKAN	540.000.000,00
2.2.3.17.14.	BELANJA MODAL PENGADAAN RADIO KOMUNIKASI DAN PERLENGKAPANNYA	49.860.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.3.17.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN PESAWAT RIG	21.000.000,00
2.2.3.17.37.	BELANJA MODAL PENGADAAN SWITCHER/MENARA ANTENA	88.750.000,00
2.2.3.18	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT UKUR	17.950.000,00
2.2.3.18.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT GPS	12.800.000,00
2.2.3.18.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN METERAN	150.000,00
2.2.3.18.22.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT UKUR/PEMBANDING	5.000.000,00
2.2.3.19.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN	14.970.301.402,00
2.2.3.19.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN UMUM	14.222.482.402,00
2.2.3.19.13	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT FARMASI	565.879.000,00
2.2.3.19.16.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT - ALAT PERLENGKAPAN KEDOKTERAN	181.940.000,00
2.2.3.20.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM	971.357.500,00
2.2.3.20.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM PETERNAKAN	44.357.500,00
2.2.3.20.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN	927.000.000,00
2.2.3.21	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN	112.167.500.000,00
2.2.3.21.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN.	111.987.000.000,00
2.2.3.21.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN SARANA PRASARANA JALAN	32.500.000,00
2.2.3.21.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS	36.000.000,00
2.2.3.21.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN JALAN KHUSUS	112.000.000,00
2.2.3.23.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN AIR	37.852.730.000,00
2.2.3.23.05	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI	29.151.730.000,00
2.2.3.23.06	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH/AIR MINUM	3.559.000.000,00
2.2.3.23.10	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI PENGAMAN PANTAI	600.000.000,00
2.2.3.23.11	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI SUNGAI	3.500.000.000,00
2.2.3.23.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN DRAINASE	950.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.3.23.18.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI	92.000.000,00
2.2.3.24.	BELANJA MODAL PENGADAAN PENERANGAN JALAN, TAMAN DAN HUTAN KOTA	1.069.000.000,00
2.2.3.24.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN LAMPU HIAS TAMAN	300.000.000,00
2.2.3.24.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN LAMPU JALAN	769.000.000,00
2.2.3.25.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI LISTRIK DAN TELEPON	55.000.000,00
2.2.3.25.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI LISTRIK	52.500.000,00
2.2.3.25.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI TELEPON	1.500.000,00
2.2.3.25.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI JARINGAN INTERNET	1.000.000,00
2.2.3.26.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN	85.191.088.575,00
2.2.3.26.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI GEDUNG KANTOR	50.894.830.000,00
2.2.3.26.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI RUMAH DINAS	2.600.000.000,00
2.2.3.26.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI GEDUNG GUDANG	200.000.000,00
2.2.3.26.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN TAMAN	1.790.000.000,00
2.2.3.26.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN PASAR	1.195.000.000,00
2.2.3.26.15.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONTRUKSI PAGAR	122.126.575,00
2.2.3.26.16.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONTRUKSI BANGUNAN SEKOLAH	24.148.878.000,00
2.2.3.26.23.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI TAMAN	1.550.000.000,00
2.2.3.26.40.	BELANJA MODAL PEMBANGUNAN RUMAH GENSET	15.000.000,00
2.2.3.26.41.	BELANJA MODAL PENGADAAN PLANG	126.250.000,00
2.2.3.26.43.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	236.886.000,00
2.2.3.26.45.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN KESEHATAN	1.530.000.000,00
2.2.3.26.48.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	446.998.000,00
2.2.3.26.84.	BELANJA MODAL PENGADAAN TUGU/TANDA BATAS	280.120.000,00
2.2.3.26.93.	BELANJA MODAL PENGADAAN PRASASTI	45.000.000,00
2.2.3.26.94.	BELANJA MODAL PENGADAAN NOMENKLATUR TAMAN	4.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.3.26.96.	BELANJA MODAL PENGADAAN MENARA DAN PENAMPUNG	6.000.000,00
2.2.3.27	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU/KEPUSTAKAAN	676.782.000,00
2.2.3.27.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU KEAGAMAAN	4.000.000,00
2.2.3.27.14.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	4.000.000,00
2.2.3.27.15	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU ILMU POLITIK DAN KETATANEGARAAN	8.000.000,00
2.2.3.27.19.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU EKONOMI DAN KEUANGAN	4.000.000,00
2.2.3.27.21.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	26.000.000,00
2.2.3.27.25.	BELANJA MODAL PENGADAAN PETA/ATLAS/GLOBE	250.000.000,00
2.2.3.27.36.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN	260.382.000,00
2.2.3.27.51.	PENGADAAN BUKU TULIS SISWA	120.400.000,00
2.2.3.28.	BELANJA MODAL PENGADAAN BARANG BERCORAK KESENIAN, KEBUDAYAAN	468.100.000,00
2.2.3.28.01	BELANJA MODAL PENGADAAN LUKISAN/FOTO	301.500.000,00
2.2.3.28.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KESENIAN	166.600.000,00
2.2.3.30	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN	8.700.000,00
2.2.3.30.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN HELM	1.350.000,00
2.2.3.30.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN SENTOLOP/SENTER	7.350.000,00
2.2.3.31.	BELANJA MODAL DANA BOS	9.535.565.727,00
2.2.3.31.01.	BELANJA MODAL DANA BOS.	9.535.565.727,00
2.2.3.34	BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN / PERALATAN PRAKTEK	1.600.000,00
2.2.3.34.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN / PERALATAN PRAKTEK	1.600.000,00
2.2.3.35.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN PEMADAM KEBAKARAN	172.500.000,00
2.2.3.35.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN PEMADAM KEBAKARAN.	172.500.000,00
2.2.3.37.	BELANJA MODAL PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	839.000.000,00
2.2.3.37.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN TRAFICT LIGHT	450.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.3.37.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN WARNING LIGHT	255.000.000,00
2.2.3.37.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN HALTE	134.000.000,00
2.2.3.38.	BELANJA MODAL BLUD	488.800.000,00
2.2.3.38.01.	BELANJA MODAL BLUD.	488.800.000,00
2.2.3.42.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT ALAT BERMAIN	180.000.000,00
2.2.3.42.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT BERMAIN TK	180.000.000,00
2.2.3.45.	BELANJA MODAL PERLENGKAPAN OLAHRAGA	63.750.000,00
2.2.3.45.01.	BELANJA MODAL PERLENGKAPAN OLAHRAGA KARATE	63.750.000,00
2.2.3.49.	BELANJA MODAL PENGADAAN DISPLAY	423.210.000,00
2.2.3.49.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN BILBORD	423.210.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.144.747.728.661,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.752.882.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	8.752.882.000,00
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.252.882.000,00
3.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	10.252.882.000,00
3.1.1.05	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA.	10.252.882.000,00
3.1.1.05.01.	.SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	10.252.882.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.252.882.000,00
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.500.000.000,00
3.2.2.	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	1.500.000.000,00
3.2.2.02	BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)	1.500.000.000,00
3.2.2.02.02	PT. BANK LAMPUNG	500.000.000,00
3.2.2.02.04	BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)	1.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	8.752.882.000,00
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI